

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem pemerintahan yang awal tersentralisasi pada pemerintah pusat secara bertahap menjadi desentralisasi yang mana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat sendiri.

Tujuan dari peraturan daerah (otonomi daerah) adalah ketercapaian penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik yang berlandaskan demokrasi dan yang lebih di fokuskan adalah peran serta masyarakat, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batasan-batasan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan diperkotaan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu sarana pendukung dalam mobilitas penduduk diperkotaan memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktifitas kita di luar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan sarana penghubung seperti alat transportasi kendaraan bermotor pasti tidak jauh dengan tempat parkir. Tempat dimana berhentinya alat transportasi untuk sementara waktu. Hal ini tentu menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam hal transportasi darat. Meningkatnya penggunaan volume kendaraan dengan berbagai aktivitas masyarakat salah satunya di Jalan Karanggetas terdapat pertokoan di sebelah kanan dan kiri jalan yang terletak pada tepi ruas jalan menyebabkan fungsi jalan kurang optimal karena akan memicu parkir di badan jalan. Hal ini berpotensi menimbulkan kemacetan karena pemilik kendaraan dapat parkir pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat tempat tujuan.

Berdasarkan Dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Salah satu adanya tujuan dari perparkiran ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 yang mengatur tentang lahan parkir di badan jalan. Dengan berjalannya peraturan tersebut menimbulkan polemik dan permasalahan dalam sistem penertibannya. Dimana dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan sementara dari Peneliti hal ini disebabkan karena dalam ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan implementasi kebijakan belum efektif yang mana Peneliti menemukan berbagai masalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan parkir. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dalam memarkirkan kendaraannya karena masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya tertib, terutama dalam masalah parkir.
- c. Masih belum optimal pelaksanaan kebijakan dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran salah satunya adalah kurangnya lahan parkir yang mengakibatkan pengendara memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

- d. Belum optimal sosialisasi dan pembinaan petugas parkir dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Berdasarkan masalah diatas, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan untuk membuat inovasi baru untuk mengatur sistem manajemen pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Maka dari itu peneliti ingin mempelajari lebih mendalam dengan mengadakan penelitian dan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Studi Kasus di Jalan Karanggetas Kota Cirebon).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan yaitu belum efektifnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut maka Peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir di Jalan Karanggetas?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas?
3. Bagaimana Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan Penelitian yang hendak di capai adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang Peneliti diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

- a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Peneliti tentang pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Jalan Karanggetas.
- b) Hasil dari penelitian yang Peneliti lakukan diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah sama.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat memperbaiki praktik sebelumnya, selain itu hasil ini dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam Penertiban Parkir di Jalan Karanggetas Kota Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan pengaplikasian kebijakan publik setelah dirumuskannya kebijakan publik itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa apabila usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk di implemenetasikan.

Dengan disahkannya kebijakan bukan berarti bahwa isu atau masalah sudah terselesaikan.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2016: 196) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Menurut teori Van Metter dan Van Horn (dalam agustino, 2020:150) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Van Metter & van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengda di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tikingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasinya. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lainnya juga perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agne pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksihukuman yang telah ditetapkan.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinas merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud menurut lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Menurut Nugroho (2016:12) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2016:128) menjelaskan bahwa kegagalan kebijakan dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak terimplementasikan yang artinya tidak terlaksana sesuai dengan rencana dan implementasi tidak berhasil dan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki karena terdapat hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik.

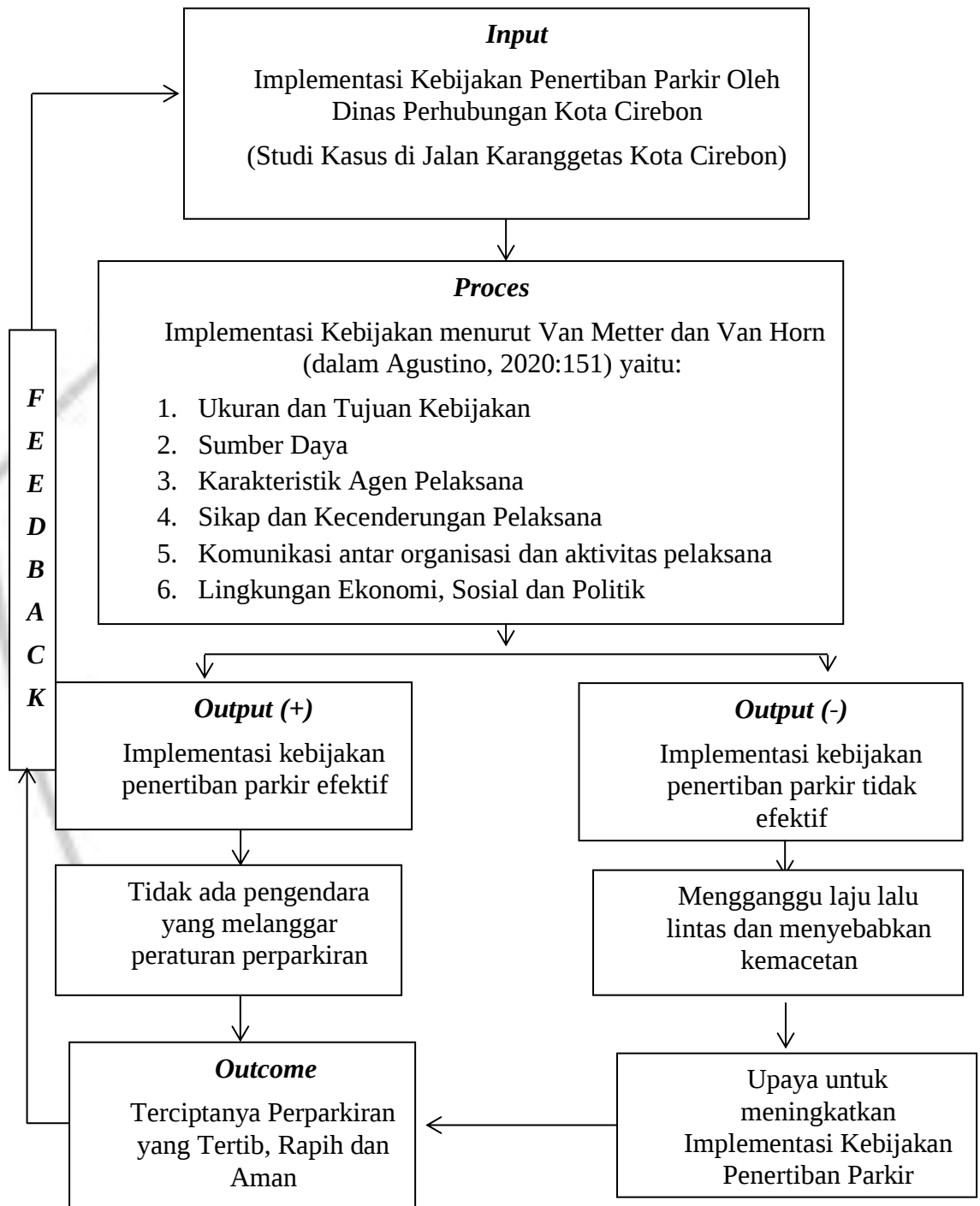
Dengan adanya Implementasi kebijakan Penertiban Parkir, Dinas Perhubungan selaku Implementor utama dan masyarakat saling bekerja sama untuk tidak menggunakan daerah larangan parkir dan mengoptimalkan lahan parkir sehingga, akan terciptanya perparkiran yang tertib, rapih dan aman. Dalam implementasi kebijakan penertiban parkir perlu memperhatikan indikator-

indikator sesuai model implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan penertiban parkir, peneliti menggunakan model kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Peneliti mengaju pada model implementasi Van Mteer dan Van Horn karena sangat berkaitan dengan apa yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diliat kerangka dasar pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan



Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Peneliti menulis konsep penelitian untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

a. Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2016:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi berbentuk pula perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut teori Van Metter dan Van Horn (dalam agustino, 2020:150) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut van Metter dan van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu: 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2). Sumberdaya 3). Karakteristik agen pelaksana 4). Sikap atau kecenderungan

para pelaksana 5). Komunikasi antar organisasi 6). Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

b. Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta (2003:30) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.

Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya. Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Widjajanti (dalam Retno, 2000:10), adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan atribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

c. Parkir

Parkir adalah menghentikan atau menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan yang bersifat sementara karena ditinggal oleh penghuninya.

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara baik kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu maupun yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Menurut PP No. 43 tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan definisi tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama.

Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian yang menghubungkan variabel dengan adanya dimensi-dimensi dari konsep teori dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1

Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan van Metter & van Horn (dalam Agustino, 2020:151)	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Sasaran dan tujuan kebijakan.
	Sumber daya	1. Sumber daya manusia 2. Sumber daya finansial
	Karakteristik Agen Pelaksana	1. Kinerja pelaksana 2. Ketegasan pelaksana
	Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana	1. Motivasi kinerja 2. Disiplin pelaksana
	Komunikasi Antar Organisasi	1. Koordinasi pelaksana
	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Lingkungan ekonomi 2. Budaya masyarakat

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang di Digunakan

Metode penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono (2014 : 8) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat

induksi kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Metode Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2017 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang Peneliti gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara interatif. Alasan Peneliti menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian yang di gunakan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban parkir sudah efektif atau belum. Dan mencari faktor penghambat pada saat implementasi untuk meningkatkan penertiban parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon bukan untuk mencari berapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, tetapi penelitian yang menulis lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (*purposive sampling*) dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam upaya mengurangi penggunaan daerah larangan parkir.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon dengan alasan agar Peneliti mendapat penelitian dan keterangan yang bersifat mengenai Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Informan – Informan dalam penelitian

a. Informan Kunci

1. Kasubbag UPT Parkir Dinas perhubungan Kota Cirebon.
2. Kepala Bidang Keselamatan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kota Cirebon

b. Informan Pendukung

1. Petugas Parkir
2. Pengguna Parkir

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yaitu buku – buku arsip, monografi, surat kabar, internet dan sumber – sumber tertulis lain.
2. Studi lapangan, Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya:
 - a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi dalam penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu suatu cara pengumplan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala – gejala yang tampak pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi, adapun sistem yang dipilih dan disepakati pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari objek yang sedang diteliti.

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan dalam Penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin /terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (*deph interview*). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.
- c. Dokumentasi Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data ini berupa pengumpulan data, foto, video, dan rekaman.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tringulasi.

Menurut Moleong (2017:330) teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, Peneliti menggunakan teknik tringulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *ceck*, *recheck*, dan *cross ceck* terhadap data itu. Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam Penelitian Kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan tringulasi dengan cara *check*, *rescheck*, dan *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak abash atau akurat. Peneliti harus melakukan tringulasi lagi dengan *check*, *rescheck*, dan *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu Penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung sebuah penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan bagaimana Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2017:246-252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Date Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, Reduksi data dapat dibantu

dengan peralatan elektronik seperti computer-mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data *Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credible*.

1.9 Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

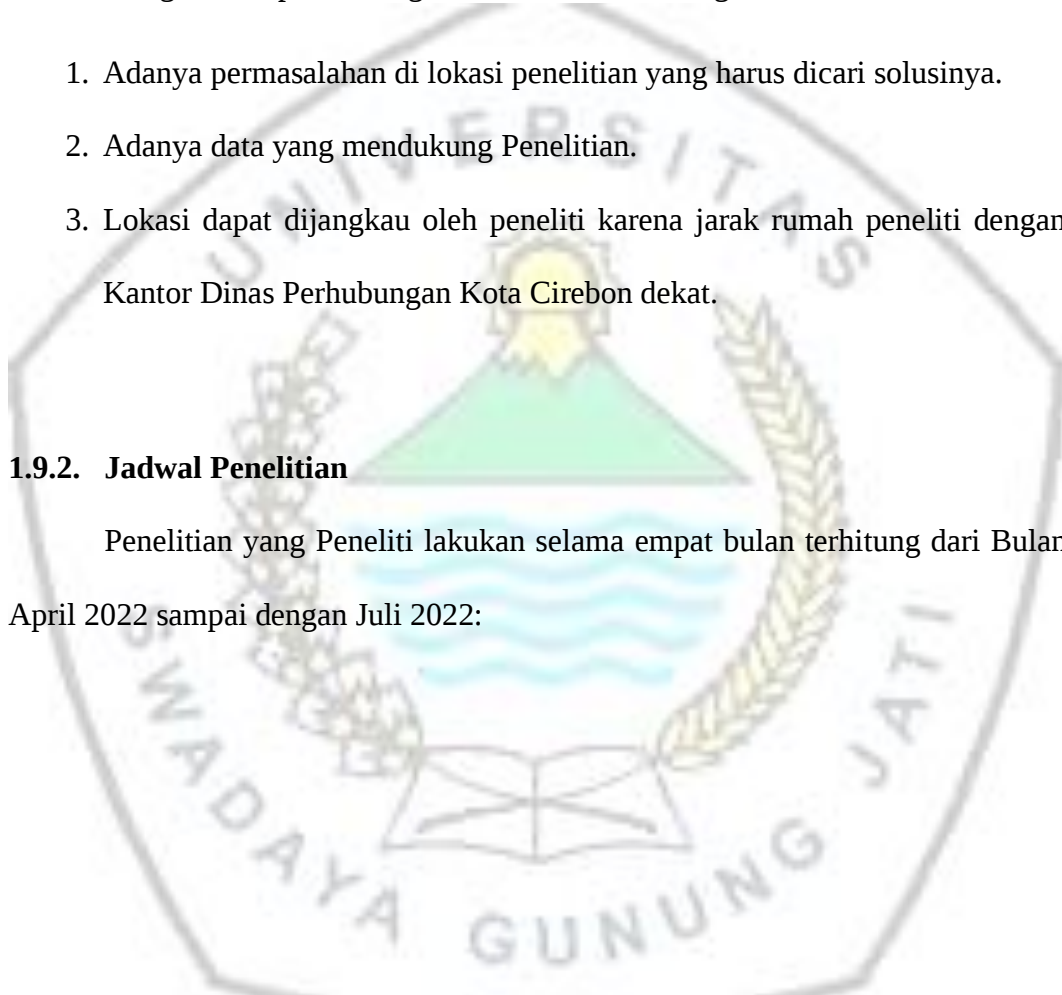
1.9.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon Jalan Terusan Pemuda No.8. Sunyaragi, Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat 45132. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan di lokasi penelitian yang harus dicari solusinya.
2. Adanya data yang mendukung Penelitian.
3. Lokasi dapat dijangkau oleh peneliti karena jarak rumah peneliti dengan Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon dekat.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penelitian yang Peneliti lakukan selama empat bulan terhitung dari Bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022:



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]